

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Dari Total Rp1,5 Triliun di APBD DKI 2019 Pembebasan Lahan RTH Sedot Anggaran Rp1,1 T

**JAKARTA (Pos Kota)**— Pemprov DKI terus menggeber ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Anggaran sebesar Rp1,5 triliun dialokasikan untuk pembebasan lahan penyediaan sarana tersebut.

Menurut Gubernur DKI, Anies Baswedan, membangun RTH di Jakarta bukan perkara mudah. Terbatasnya ketersediaan lahan menjadi kendala. "Saat ini kami tengah fokus untuk lakukan pembebasan lahan. Karena memang persoalan lahan kerap menjadi penghambat tercapainya target 30 persen

RTH di ibukota," ungkap Anies di Balaikota, Senin (7/10).

Lebih lanjut orang nomor satu di ibukota menjabarkan di tahun ini Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan. Dari total anggaran tersebut, telah terserap sebesar Rp1,1 triliun. "Penambahan RTH memang menjadi salah satu fokus kami karena memang keberadaannya untuk keseimbangan kota ini," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala UP Pengadaan Tanah Dinas Kehutanan DKI

Jakarta, Dirja Kusuma, mengatakan pengadaan tanah nantinya akan digunakan untuk tiga jenis RTH. Yakni, taman, hutan kota, serta area pemakaman.

Dirja menjelaskan, target dan realisasi luasan tanah untuk pengadaan RTH bervariasi. Rinciannya, realisasi pengadaan tanah untuk RTH taman seluas 16,8 hektare, melebihi dari yang ditargetkan sebesar 12,5 hektare.

Kemudian, pengadaan tanah untuk RTH hutan kota mencapai 1,6 hektare dari target 7,5 hektare. Sementara, realisasi pengadaan

tanah RTH untuk makam seluas 1,3 hektare dari target 3 hektare.

"Hingga 3 Oktober 2019 kami menerima 1.144 permohonan warga yang ingin menjual tanahnya untuk digunakan sebagai RTH. Sekitar 500 permohonan sudah ditindaklanjuti dengan survei langsung ke lapangan," terangnya.

### SURVEI KELAYAKAN

Menurutnya, tim survei akan melihat layak atau tidaknya tanah tersebut untuk dijadikan sebagai RTH. Selain itu, keabsahan atau le-

galitas kepemilikan tanah juga menjadi persyaratan penting.

Ia menambahkan setelah pengadaan selesai, selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama bidang-bidang terkait. Yaitu Bidang Taman, Jalur, Pemukiman, dan Kehutanan untuk menentukan penggunaan tanah. "Nantinya, bidang-bidang terkait itu yang akan merencanakan teknis pembangunannya," kata Dirja.

"Kami hanya memiliki kewenangan untuk pengadaan tanah dengan luas 250 meter hingga 5 hektare," pungkasnya. (john/ruh)